

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS
LEMBAGA PANTI PELAYANAN SOSIAL
ANAK MANDIRI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

MARIA IMAKULATA TITI SARASWATI

NIM : 21.C1.0034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN JUDUL

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS
LEMBAGA PANTI PELAYANAN SOSIAL
ANAK MANDIRI SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh :

MARIA IMAKULATA TITI SARASWATI

21.C1.0034

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

NPP: 058.5.2025.374

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk sosial yang belum dewasa memerlukan perlindungan dan pembinaan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus terlebih dalam pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pantipelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang serta menganalisis kendala yang dihadapi lembaga pantipelayanan sosial dalam pelaksanaan hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dengan menggabungkan data sekunder melalui wawancara dengan Pekerja Sosial Ahli dan Anak Binaan di Lembaga Pantipelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban negara dan lembaga pendamping atau rehabilitasi sesuai yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Studi pada Pantipelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang menunjukkan upaya pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal serta pelatihan keterampilan sebagai bagian dari pembinaan anak. Kendala internal yang menjadi penghambat kelancaran proses pembinaan ialah rendahnya motivasi belajar dan pola tidur yang tidak sehat pada anak binaan. Sedangkan kendala eksternalnya berupa hambatan zonasi sekolah di wilayah Kota Semarang dan keterbatasan tenaga pengajar terutama pada PKBM Wacana Mulya. Pantipelayanan sosial telah melakukan upaya pendekatan yang holistik dan bersinergi dengan antar lembaga agar anak binaan memperoleh pendidikan yang layak dan dapat melakukan reintegrasi sosial secara optimal setelah masa pembinaan atau pendampingan.

Simpulan dan saran dari penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan di Pantipelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang melalui pemetaan potensi anak dan peningkatan kerja sama dengan lembaga terkait. Penguatan bimbingan psikologis dan pembiasaan disiplin menjadi kunci dalam mengatasi kendala internal, sementara penyesuaian kebijakan zonasi dan koordinasi antar dinas terkait diperlukan untuk mengatasi kendala eksternal. Upaya ini diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan anak binaan secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci : Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Hak pendidikan anak, Pantipelayanan Sosial